

ABSTRAK

Kendaraan bermotor digunakan sebagai alat transportasi manusia untuk beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemeriksaan kelengkapan kendaraan, masih banyak ditemukan kendaraan yang tidak menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia atau TNKB yang sesuai dengan standarnya. Pelanggaran pembuatan plat nomor kendaraan yang dilakukan oleh oknum-oknum pelaku usaha perseorangan, dengan mudahnya menjadikan masyarakat terus menerus melakukan jual beli plat kendaraan sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus menunggu TNKB resmi dari Korlantas Polri. Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seolah-olah menunjukkan pemakaian TNKB hanya dibebankan kepada penggunaannya atau pemilik kendaraan bukan kepada oknum pelaku usaha perseorangan pembuatan ilegal TNKB.

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu mempelajari tentang penelitian hukum normatif, bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha pembuatan TNKB melanggar pasal 55 KUHP, karena dalam Pasal 55 pelaku merupakan orang yang turut melakukan, artinya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku disini sudah melaksanakan pembuatan TNKB yang disuruh konsumen yang memesan TNKB dan melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan dalam pembuatan TNKB itu sendiri, sudah ada syarat dan aturan yang mengatur baik dari segi bahan dan ukuran.

Kata Kunci: TNKB; Kendaraan Bermotor; Kepolisian

ABSTRACT

Motorized vehicle is used for transportation of people for activities in everyday life. When the completeness of vehicle is inspected, there are many vehicles do not use Vehicle Registration Number (TNKB) which has stipulated by the Indonesian National Police or the TNKB's standard. The breach of making vehicle number which done by individual business makes society often doing buy and sell it without waiting for the official vehicle number by Korlantas Polri. The problem of this study is in Law Number 22 of 2009, concerning about Road Traffic and Transportation; which shows that the using of illegal TNKB is only burdened for the user or vehicle owners and do not burdened for the individual business who manufactures the illegal TNKB.

The focus of this study is explained about normative legal research, primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. The result of this study is the TNKB's individual business breaks the Clause 55 of KUHP, because in Article 55, the perpetrator is a person who participates in the act, meaning that he must carry out the act of implementation, the perpetrator here has carried out the creation of the TKB which was ordered by the consumer who ordered the TNKB and did the act. While in making the TNKB itself, there are some terms and regulations which systematize the material and the size.

Keywords: TNKB; Motor vehicle; Police